BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

OPD | KABAG HUKUM

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

OPD | KABAG HUKUM

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

OPD | KABAG HUKUM

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

OPD | KABAG HUKUM

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tanun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tanun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tanun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1).



46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Daerah	65.728.304.508,13	
	b. Dana perimbangan	811.938.611.059,90	
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.....	243.840.685.902,00	
	Jumlah Pendapatan		1.121.507.601.470,03
2	Belanja		
	a. Belanja Tidak Langsung		
	1) Belanja pegawai	389.784.516.085,00	
	2) Belanja bunga	-	
	3) Belanja subsidi	-	
	4) Belanja hibah	17.035.908.400,00	
	5) Belanja bantuan sosial	250.000.000,00	
	6) Belanja bagi hasil	1.590.573.900,00	
	7) Belanja bantuan keuangan	192.928.581.683,00	
	8) Belanja tidak terduga	2.367.914.340,68	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung		603.957.494.408,68
	b. Belanja Langsung		
	1) Belanja pegawai	63.024.388.154,00	
	2) Belanja barang dan jasa	268.954.472.332,20	
	3) Belanja Modal	211.520.886.074,15	
	Jumlah Belanja Langsung		543.499.746.560,35
	Jumlah Belanja		1.147.457.240.969,03
	Surplus (defisit)		(25.949.639.499,00)
3	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	26.949.639.499,00	
	b. Pengeluaran	1.000.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan Netto.....		25.949.639.499,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan.		-

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bag. Pembangunan	
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 67

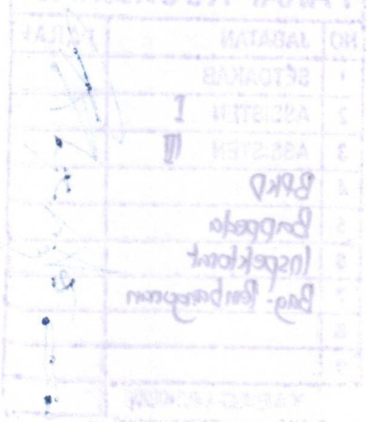

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.121.507.601.470,03	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	65.728.304.508,13	
4.1.1	**Hasil Pajak Daerah**	11.555.032.178,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	84.748.350,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	4.465.000,00	
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	72.063.350,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	8.220.000,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.552.440.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.509.480.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	17.760.000,00	
4.1.1.02.06	Warung	25.200.000,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.500.000,00	
4.1.1.03.20	Pertunjukan/Show	2.500.000,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	65.343.828,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	63.723.828,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	1.620.000,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	5.700.000.000,00	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.100.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.100.000.000,00	
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	
4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	4.350.705.973,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.128.731.473,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.224.478.243,00	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	117.600.000,00	
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	132.596.000,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	299.308.800,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.300.000,00	
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	254.448.430,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.141.774.500,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	413.887.000,00	
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	500.700.000,00	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	6.300.000,00	
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	56.784.000,00	
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	145.398.500,00	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.055.000,00	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.000.000,00	
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.650.000,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	80.200.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	77.500.000,00	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	2.700.000,00	
4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	4.431.364.507,13	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.431.364.507,13	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	4.431.364.507,13	
4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	45.391.201.850,00	
4.1.4.02	Jasa Giro	1.500.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	2.000.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	2.000.000.000,00	
4.1.4.10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.000.000.000,00	
4.1.4.10.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	400.000,00	
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pekerjaan	999.600.000,00	
4.1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	52.575.000,00	
4.1.4.14.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	52.575.000,00	
4.1.4.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.579.212.650,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.15.01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.579.212.650,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	27.259.414.200,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	27.259.414.200,00	
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	811.938.611.059,90	
4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	19.683.334.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	12.128.814.000,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	4.360.753.000,00	
4.2.1.01.04	Pengembalian PBB Bagian Pemerintah Pusat	4.767.883.000,00	
4.2.1.01.05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	3.000.178.000,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.554.520.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	71.147.000,00	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	468.283.000,00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	5.322.035.000,00	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	846.946.000,00	
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	659.634.000,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	186.475.000,00	
4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	557.660.829.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	557.660.829.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	557.660.829.000,00	
4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	234.594.448.059,90	
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Fisik	148.771.481.059,90	
4.2.3.02.01	DAK Reguler	90.317.391.995,90	
4.2.3.02.02	DAK Penugasan	24.880.983.064,00	
4.2.3.02.03	DAK Afirmasi	33.573.106.000,00	
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85.822.967.000,00	
4.2.3.03.01	DAK Tunjangan Profesi Guru	56.980.011.000,00	
4.2.3.03.02	DAK Tambahan Penghasilan Guru PNS / Non Profesi	690.000.000,00	
4.2.3.03.03	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	3.294.600.000,00	
4.2.3.03.04	DAK Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.100.273.000,00	
4.2.3.03.05	DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.206.250.000,00	
4.2.3.03.06	DAK Jaminan Persalinan	1.607.651.000,00	

OPD KABAG KEUANGAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.3.03.07	DAK Akreditasi Puskesmas	798.574.000,00	
4.2.3.03.09	DAK Administrasi Kependudukan	1.515.028.000,00	
4.2.3.03.10	DAK Tunjangan Khusus Guru	2.485.648.000,00	
4.2.3.03.11	DAK Penyelenggaraan Kesetaraan	1.200.600.000,00	
4.2.3.03.12	DAK Pelayanan Kepariwisataan	785.004.000,00	
4.2.3.03.13	DAK Pengawasan Obat dan Makanan	159.328.000,00	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	243.840.685.902,00	
4.3.1	**Pendapatan Hibah**	40.902.044.900,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.838.245.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	8.838.245.000,00	
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana BOS	32.063.799.900,00	
4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS	32.063.799.900,00	
4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	75.506.856.002,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	75.506.856.002,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	14.816.052.929,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.990.736.447,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.176.224.937,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	266.620.664,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.257.221.025,00	
4.3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	127.431.785.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	127.431.785.000,00	
4.3.4.01.01	Dana Alokasi Desa/Pekon (ADP)	127.431.785.000,00	
5	**BELANJA DAERAH**	1.147.457.240.969,03	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	603.957.494.408,68	
5.1.1	**BELANJA PEGAWAI**	389.784.516.085,00	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	344.794.969.835,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	211.736.502.304,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	19.785.682.789,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	8.877.773.000,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.167.633.700,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.802.570.508,00	

OPD

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	10.820.228.200,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	714.477.799,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.995.999,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.371.930.436,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	67.032.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.106.700,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	43.299.900,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	29.780.100,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	10.413.900,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	20.000.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	3.072.000.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	35.000.000,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Reses	661.500.000,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	3.379.200.000,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	56.980.011.000,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Guru PNS/Non Profesi	690.000.000,00	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	2.485.648.000,00	
5.1.1.01.27	Tunjanga Badan Pembentuan Peraturan Daerah	19.183.500,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	41.773.944.250,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	41.691.144.250,00	
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	66.000.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	16.800.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.156.880.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak	58.722.000,00	
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	58.722.000,00	
5.1.4	**BELANJA HIBAH**	17.035.908.400,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	17.035.908.400,00	
5.1.4.05.01	Hibah Kepada Lembaga-Lembaga Pemerintah	2.607.805.000,00	
5.1.4.05.02	Hibah Kepada Organisasi Olah Raga Daerah	1.250.000.000,00	
5.1.4.05.03	Hibah Kepada Organisasi Profesi	730.000.000,00	
5.1.4.05.04	Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan Generasi Muda	935.000.000,00	

OPD BAGIAN HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4.05.05	Hibah Kepada Organisasi Keagamaan	3.150.000.000,00	
5.1.4.05.06	Hibah Kepada Organisasi Sosial Wanita	345.000.000,00	
5.1.4.05.07	Hibah Kepada Organisasi Seni dan Pariwisata	2.025.000.000,00	
5.1.4.05.08	Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Pendidikan	5.373.103.400,00	
5.1.4.05.09	Hibah Kepada Organisasi Veteran	45.000.000,00	
5.1.4.05.10	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Laiinnya	575.000.000,00	
5.1.5	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**	250.000.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	250.000.000,00	
5.1.5.03.01	Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	250.000.000,00	
5.1.6	**BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA**	1.590.573.900,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.155.503.300,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Pekon	1.155.503.300,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	435.070.600,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Pekon	435.070.600,00	
5.1.7	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK**	192.928.581.683,00	
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	1.950.000.000,00	
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	1.950.000.000,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	190.307.307.000,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pekon	190.307.307.000,00	
5.1.7.05	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	671.274.683,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada PARPOL	671.274.683,00	
5.1.8	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	2.367.914.340,68	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	2.367.914.340,68	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.367.914.340,68	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	543.499.746.560,35	
5.2.1	**BELANJA PEGAWAI**	63.024.388.154,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	23.093.821.854,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	68.775.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa	22.190.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.01.09	Honorarium Peserta	131.210.000,00	
5.2.1.01.10	Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis	9.322.051.854,00	
5.2.1.01.13	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	184.115.000,00	
5.2.1.01.14	Honorarium Pejabat Pengadaan	56.275.000,00	
5.2.1.01.15	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	61.080.000,00	
5.2.1.01.16	Honorarium Pengelola Keuangan	6.526.500.000,00	
5.2.1.01.18	Insentif Tenaga Kesehatan	6.721.625.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.103.560.592,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	20.094.489.300,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Peserta	2.218.275.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Tenaga Medis	9.300.000,00	
5.2.1.02.05	Honorarium Tenaga Survey	1.272.440.000,00	
5.2.1.02.06	Honorarium Teknisi ICT	34.800.000,00	
5.2.1.02.07	Honorarium/Upah Tenaga Tidak Terampil	394.425.000,00	
5.2.1.02.08	Honorarium/Upah Tukang	189.875.000,00	
5.2.1.02.09	Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan	1.114.756.292,00	
5.2.1.02.10	Honorarium/Upah Kepala Lingkungan	775.200.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.000.000,00	
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD	12.019.813.708,00	
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD.	12.019.813.708,00	
5.2.1.09	Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	1.805.192.000,00	
5.2.1.09.01	Belanja Pegawai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	1.805.192.000,00	
5.2.2	**BELANJA BARANG DAN JASA**	268.954.472.332,20	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.371.203.745,00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	6.867.152.255,00	
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	94.644.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	720.823.450,00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos	225.250.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.959.203.140,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	364.850.900,00	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	16.000.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	74.540.000,00	
5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	476.198.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Bahan Kedoteran Hewan	14.250.000,00	

OPD | BAGIAN HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.01.11	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Gudang	1.558.292.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.586.731.791,00	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	773.353.150,00	
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	221.348.500,00	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	236.350.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.491.004.950,00	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	351.029.500,00	
5.2.2.02.07	Belanja Teropy/Piala	130.600.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pengobatan	423.859.234,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pameran	366.960.281,00	
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Elektronik / Mesin	396.037.700,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Display/Dekorasi	364.151.600,00	
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Peralatan Kesehatan	804.929.100,00	
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Peraga	306.535.400,00	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Material Pertanian/Perkebunan	193.078.076,00	
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Sarana Budidaya Ikan	5.382.000,00	
5.2.2.02.18	Belanja Bahan/Alat Sample	21.652.200,00	
5.2.2.02.19	Belanja Bahan Makanan	142.518.550,00	
5.2.2.02.20	Belanja Bahan/Material Alat Pengolahan	109.909.500,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Perlengkapan Lomba	74.844.700,00	
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Rumah Tangga	13.473.850,00	
5.2.2.02.23	Belanja Bahan Pelatihan/Seminar Kit	98.615.800,00	
5.2.2.02.24	Belanja Bahan Baku Pembuatan Kemasan	61.097.700,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.434.050.900,00	
5.2.2.03.01	Belanja telepon	646.770.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja air	464.790.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	5.024.580.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.787.240.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.677.030.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	31.230.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	360.850.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.431.827.500,00	
5.2.2.03.11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	19.768.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Media Elektronik	1.296.900.000,00	

OPD | BAGIAN HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi	7.233.560.000,00	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Perawatan dan Pengobatan	1.246.860.400,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uji Labolatorium	198.625.000,00	
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Retribusi Sampah	13.020.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	9.285.014.100,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	9.234.028.100,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.986.000,00	
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Jiwa	40.000.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.935.586.820,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	713.200.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	948.986.500,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.090.382.820,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	5.125.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	241.015.500,00	
5.2.2.05.07	Belanja Ban dan Accu	1.731.327.000,00	
5.2.2.05.08	Belanja Registrasi Kendaraan Bermotor	205.550.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.534.534.978,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.618.968.090,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.658.486.888,00	
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan (+ Cover)	257.080.000,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.288.990.000,00	
5.2.2.07.01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	25.000.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	855.060.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	124.600.000,00	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Kebun / Perlengkapan Taman	9.500.000,00	
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.274.830.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.176.822.236,00	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.176.822.236,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.735.781.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	412.031.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	72.500.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	1.617.500.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	19.600.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Alat Setudio	2.832.250.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Elektronik	38.750.000,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Dekorasi	166.750.000,00	
5.2.2.10.14	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	570.400.000,00	
5.2.2.10.15	Belanja Sewa Perlengkapan Rumah Tangga	4.500.000,00	
5.2.2.10.16	Belanja Sewa Alat Peraga	1.500.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.034.686.100,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.414.487.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.757.010.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.360.215.100,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makan dan Minum Insidentil	3.500.049.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makan dan Minum Rumah Tangga	1.699.000.000,00	
5.2.2.11.08	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.478.862.500,00	
5.2.2.11.09	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi	825.062.500,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	586.620.000,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	160.305.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	140.000.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	3.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	100.100.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.000.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	31.975.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	87.500.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Atribut	45.740.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.170.351.700,00	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	626.075.700,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja Beserta Kelengkapanya	428.055.000,00	
5.2.2.13.03	Belanja tas	116.221.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.199.672.500,00	
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	175.000.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	342.882.500,00	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	338.790.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian paskibra	315.000.000,00	
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Muslim	28.000.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.080.481.850,00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.819.589.100,00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.464.619.900,00	
5.2.2.15.05	Belanja Transportasi	7.796.272.850,00	

OPD | KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	43.539.988,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	43.539.988,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.592.128.500,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan	4.460.920.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	34.166.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	97.042.500,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.526.728.150,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	1.509.159.950,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	303.811.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	20.413.750,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan instalasi Air	10.000.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Taman	14.499.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	187.801.000,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.462.500.000,00	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	51.800.000,00	
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Bangunan Sejarah	43.343.000,00	
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Meubelair	37.300.000,00	
5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	377.462.300,00	
5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan	35.000.000,00	
5.2.2.20.22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan	66.700.000,00	
5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Internet / Website	210.600.000,00	
5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum	29.934.150,00	
5.2.2.20.27	Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	166.404.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga	7.194.230.708,20	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	626.000.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	3.602.565.708,20	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultasi pengawasan	176.750.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Software	49.000.000,00	
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan	800.000.000,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai	477.880.000,00	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Event Organizer	1.116.550.000,00	
5.2.2.21.08	Belanja Jasa Cleaning Service	345.485.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	57.173.127.630,00	
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	53.701.940.030,00	

OPD BAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.23.02	Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	3.471.187.600,00	
5.2.2.25	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.347.160.000,00	
5.2.2.25.01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.072.150.000,00	
5.2.2.25.02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga .	275.010.000,00	
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	14.270.594.636,00	
5.2.2.26.01	Belanja barang dan Jasa BLUD.	14.270.594.636,00	
5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	646.620.000,00	
5.2.2.27.01	Belanja Barang Dan Jasa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	646.620.000,00	
5.2.2.28	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.726.640.000,00	
5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.	8.726.640.000,00	
5.2.3	**BELANJA MODAL**	211.520.886.074,15	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.250.000.000,00	
5.2.3.01.66	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong	1.250.000.000,00	
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	47.202.000,00	
5.2.3.02.09	Belanja Modal Pengadaan Shine Saw	4.500.000,00	
5.2.3.02.13	Belanja modal Pengadaan mesin pompa air	42.702.000,00	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	7.159.601.500,00	
5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	2.811.251.500,00	
5.2.3.03.06	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck	1.400.000.000,00	
5.2.3.03.10	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans	1.050.000.000,00	
5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	237.350.000,00	
5.2.3.03.16	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulance	1.661.000.000,00	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	34.000.000,00	
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	34.000.000,00	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	101.653.870,00	
5.2.3.09.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	37.225.000,00	
5.2.3.09.16	Belanja modal Pengadaan Alat Procesing	64.428.870,00	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.554.521.500,00	
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	20.500.000,00	
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	900.000,00	
5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	34.394.000,00	

OPD KABAG

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.10.07	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	2.250.500,00	
5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	2.800.000,00	
5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	35.064.000,00	
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Genset	1.052.418.000,00	
5.2.3.10.16	Belanja Pengadaan Peralatan SAR	190.000.000,00	
5.2.3.10.17	Belanja Modal Pengadaan AC	148.500.000,00	
5.2.3.10.18	Belanja Modal Pengadaan Proyektor dan Perlengkapannya	43.470.000,00	
5.2.3.10.29	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	24.225.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.120.144.000,00	
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	320.817.000,00	
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas	9.200.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	64.591.500,00	
5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	1.000.000,00	
5.2.3.11.06	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	900.000,00	
5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Bendera/Umbul Umbul	53.300.000,00	
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Gorden	449.905.500,00	
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Karpet	132.750.000,00	
5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur	2.550.000,00	
5.2.3.11.18	Belanja Modal Tenda	12.800.000,00	
5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	20.640.000,00	
5.2.3.11.21	Belanja Modal Kotak Perkakas	5.190.000,00	
5.2.3.11.22	Belanja Modal Pengadaan Teralis	46.500.000,00	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.241.254.600,00	
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	150.000.000,00	
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	531.400.000,00	
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Laptop/note book	2.054.515.000,00	
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	719.345.000,00	
5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scaner	51.700.000,00	
5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display/LCD	67.391.000,00	
5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	187.600.000,00	
5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	63.551.900,00	
5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan software/sistem aplikasi komputer	79.000.000,00	
5.2.3.12.12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Internet	323.311.700,00	
5.2.3.12.14	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk External	2.000.000,00	
5.2.3.12.15	Belanja Modal Pengadaan Signature Pad	11.440.000,00	

OPD | KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebelair	4.158.421.408,00	
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	443.150.000,00	
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	155.000.000,00	
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	160.500.000,00	
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	343.500.000,00	
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	2.000.000,00	
5.2.3.13.06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	65.240.000,00	
5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	367.620.000,00	
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	47.000.000,00	
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Buffet	34.000.000,00	
5.2.3.13.13	Belanja Modal Pengadaan Rak	426.898.000,00	
5.2.3.13.18	Belanja modal Pengadaan kursi tamu	286.800.000,00	
5.2.3.13.20	Belanja modal pengadaan meubelair Sekolah	1.384.318.000,00	
5.2.3.13.22	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor	436.995.408,00	
5.2.3.13.29	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	5.400.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	211.633.250,00	
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	1.837.500,00	
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	7.620.000,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	2.000.000,00	
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	22.661.250,00	
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	19.375.000,00	
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring	1.200.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	64.308.600,00	
5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	68.930.900,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	18.000.000,00	
5.2.3.14.11	Belanja modal Pengadaan rice cooker	5.700.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	814.360.000,00	
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	42.183.200,00	
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	15.222.800,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Proyektor	9.090.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengandaan Mokrofon	2.000.000,00	
5.2.3.16.06	Belanja modal Pengadaan televisi	44.791.000,00	
5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan Megapon	377.400.000,00	
5.2.3.16.10	Belanja modal Pengadaan sound system	242.173.000,00	
5.2.3.16.11	Belanja Modal Pengadaan Layar/Screen	25.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.16.14	Belanja Modal Pengadaan Parabola Set	6.500.000,00	
5.2.3.16.16	Belanja Modal Pengadaan Drone	50.000.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	742.811.696,00	
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	20.000.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	1.750.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	15.450.000,00	
5.2.3.17.08	Belanja modal Pengadaan telepon seluler	37.500.000,00	
5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan	321.580.000,00	
5.2.3.17.14	Belanja Modal Pengadaan Radio Komunikasi dan Perlengkapannya	321.031.696,00	
5.2.3.17.37	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	25.500.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	12.000.000,00	
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	12.000.000,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	20.399.428.091,99	
5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	19.547.995.735,99	
5.2.3.19.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	754.637.950,00	
5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Perlengkapan Kedokteran	3.794.406,00	
5.2.3.19.18	Belanja Modal Sarana Pelayanan KB	93.000.000,00	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.163.120.500,00	
5.2.3.20.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	42.048.000,00	
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan	76.580.000,00	
5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Komputer	942.100.000,00	
5.2.3.20.75	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Bahasa Indonesia	239.576.000,00	
5.2.3.20.76	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : Matematika	143.839.000,00	
5.2.3.20.77	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Dasar	444.920.000,00	
5.2.3.20.79	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPA Menengah	212.972.500,00	
5.2.3.20.81	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga Bidang Studi : IPS	213.970.000,00	
5.2.3.20.87	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	1.847.115.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	68.504.086.639,16	
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.	63.056.841.919,91	
5.2.3.21.05	Belaja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	77.800.000,00	
5.2.3.21.10	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa	4.125.519.279,25	
5.2.3.21.11	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	107.000.000,00	
5.2.3.21.15	Pembangunan Sarana Dan Prasaran Kelurahan	1.136.925.440,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	2.817.600.000,00	
5.2.3.22.08	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	2.817.600.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	26.574.606.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	14.221.593.000,00	
5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	5.325.250.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	9.300.000,00	
5.2.3.23.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sungai	5.363.765.000,00	
5.2.3.23.12	Belanja Modal Pengadaan Kontuksi Jaringan Drainase	1.641.948.000,00	
5.2.3.23.62	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku La'innya	12.750.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	649.500.000,00	
5.2.3.24.02	Belanja modal Pengadaan lampu hias taman	150.000.000,00	
5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan lampu jalan	499.500.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	375.668.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	365.668.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja modal pengadaan Instalasi Jaringan Internet	10.000.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan	51.685.325.119,00	
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi gedung kantor	16.280.729.540,00	
5.2.3.26.02	Belanja modal Pengadaan konstruksi rumah jabatan	1.781.920.000,00	
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi rumah dinas	299.700.000,00	
5.2.3.26.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi bangunan bersejarah	90.000.000,00	
5.2.3.26.10	Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Taman	2.439.225.600,00	
5.2.3.26.13	Belanja modal Pengadaan konstruksi Tempat Wisata	1.465.764.579,00	
5.2.3.26.15	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar	1.702.314.300,00	
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Sekolah	14.756.683.000,00	
5.2.3.26.23	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	66.000.000,00	
5.2.3.26.41	Belanja Modal Pengadaan Plang	7.500.000,00	
5.2.3.26.43	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	160.704.000,00	
5.2.3.26.45	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.607.048.000,00	
5.2.3.26.56	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jamban	1.048.760.000,00	
5.2.3.26.62	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	4.745.726.100,00	
5.2.3.26.84	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	150.000.000,00	
5.2.3.26.86	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	47.250.000,00	
5.2.3.26.93	Belanja Modal Pengadaan Prasasti	36.000.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	8.501.732.950,00	
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	10.250.000,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.27.25	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	88.270.000,00	
5.2.3.27.36	Belanja Modal Pengadaan Buku Perpustakaan	1.849.500.000,00	
5.2.3.27.39	Belanja Modal Pengadaan Buku Mata Pelajaran	6.437.214.500,00	
5.2.3.27.49	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video	116.498.450,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	2.824.065.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	11.100.000,00	
5.2.3.28.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kesenian	2.076.350.000,00	
5.2.3.28.09	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga	690.715.000,00	
5.2.3.28.12	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan	45.900.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	974.000.000,00	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek	974.000.000,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	183.000.000,00	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Pengadaan Halte	183.000.000,00	
5.2.3.38	Belanja Modal BLUD	978.562.350,00	
5.2.3.38.01	Belanja Modal BLUD.	978.562.350,00	
5.2.3.42	Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Bermain	726.060.000,00	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Pengadaan Alat Bermain TK	726.060.000,00	
5.2.3.44	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Pertanian	401.484.100,00	
5.2.3.44.01	Pengadaan Kelengkapan Penyuluh Pertanian	401.484.100,00	
5.2.3.45	Belanja Modal Perlengkapan Olahraga	192.543.500,00	
5.2.3.45.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara	4.676.000,00	
5.2.3.45.07	Belanja Modal Pengadaan Sarana Pendidikan Jasamani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)	187.867.500,00	
5.2.3.49	Belanja Modal Pengadaan Display	122.500.000,00	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Pengadaan Bilbord	122.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.949.639.499,00)	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		
6.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	26.949.639.499,00	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	26.949.639.499,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	26.949.639.499,00	
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	7.000.000.000,00	
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	17.945.612.268,00	

OPD KABAG HUKUM

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	1.004.027.231,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	1.000.000.000,00	
6.2.2	**Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah**	1.000.000.000,00	
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	
6.2.2.02.02	PT. Bank Lampung	1.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.949.639.499,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bag. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	1.004.027.231,00	
6.1.1.04.04	Belanja Modal	1.000.000.000,00	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	1.000.000.000,00	
6.2.2	**Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah**	1.000.000.000,00	
6.2.2.02	Badan usaha milik daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	
6.2.2.02.02	PT. Bank Lampung	1.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.949.639.499,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PANDSIL MASSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	Bag. Pembangunan	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	